

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PADANG UNTUK
MENCIPTAKAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PEGAWAI
TAHUN ANGGARAN 2006
(Studi : BAPPEDA Kota Padang)**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Politik*



OLEH :

RIKA RUSTAM
05 193 046



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul " Kebijakan Pemerintah Kota Padang Untuk Menciptakan Efisiensi Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2006 (Studi : Bappeda Kota Padang). Adapun latar belakang dari penulisan ini adalah adanya gagasan penataan kembali sistem otonomi daerah yang bertolak belakang dari pemikiran untuk menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik pemerintah daerah. Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, maka sejak itu pula pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah, termasuk juga kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah ini menyangkut 2 (dua) aspek, yaitu aspek penerimaan dan aspek pengeluaran atau belanja daerah. Dari segi belanja daerah, pemerintah daerah dituntut untuk bisa menciptakan efisiensi sehingga pengeluarannya dapat ditekan, dan kelebihannya dapat dimanfaatkan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. Kota Padang yang juga mendapat otoritas kewenangan dari pusat juga dituntut untuk dapat menciptakan efisiensi dari segi belanja daerahnya. Untuk menciptakan efisiensi tersebut, Pemerintah Kota Padang menyarankan pada setiap SKPD (dalam hal ini termasuk Bappeda Kota Padang) untuk membuat kebijakan dalam menciptakan efisiensi anggaran belanja daerah, khususnya anggaran belanja pegawai.

Anggaran belanja pegawai merupakan salah satu pengeluaran terbesar Kota Padang saat ini, sementara pendapatan daerah yang diperoleh sangatlah kecil karena Kota Padang sangat sedikit sekali mempunyai Sumber Daya Alam. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan untuk menciptakan efisiensi anggaran belanja pegawai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui bentuk kebijakan Pemerintah Kota Padang khususnya Bappeda Kota Padang untuk menciptakan efisiensi anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2006, (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah Kota Padang khususnya Bappeda Kota Padang untuk menciptakan efisiensi anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2006, (3) Untuk mengetahui usaha yang dilakukan Pemerintah Kota Padang khususnya Bappeda Kota Padang untuk meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi tersebut.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori Kebijakan Publik (Riant Nugroho, 2004), Teori Kebijakan Efisiensi Anggaran (Chalid, 2005), dan penjelasan konsep-konsep mengenai Anggaran Belanja Daerah, Belanja Pegawai, Konsep Efisiensi, serta Konsep Kendala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah metodologi penelitian yang didalamnya mencakup pandangan-pandangan filsafat mengenai tata tertib penyelidikan dan realitas dari objek yang diteliti. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, artinya penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hal seperti apa adanya.

Hasil atau temuan akhir yang diperoleh dari penelitian ini adalah belum ada kebijakan tertulis dari Pemerintah Kota Padang dalam hal penciptaan efisiensi anggaran belanja pegawai, namun Bappeda Kota Padang telah membuat kebijakan internal menyangkut efisiensi anggaran belanja pegawai. Terbukti dengan pada tahun anggaran 2006 Bappeda Kota Padang dapat menciptakan efisiensi anggaran belanja pegawai sebanyak 12,55 %.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis multidimensional yang tengah melanda bangsa Indonesia telah menyadarkan kita akan pentingnya menggagas kembali konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam arti yang sebenarnya. Gagasan penataan kembali sistem otonomi daerah bertolak dari pemikiran untuk menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintah daerah.

Selama masa Orde Baru, harapan yang besar dari pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan. Yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Mardiasmo, 2002:95).

Dengan adanya kedua undang-undang tersebut di atas, pemerintah daerah berhak melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi dari kedudukan daerah sebagai daerah otonom. Agar pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan efektif, pemerintah daerah membutuhkan dana yang memadai. Pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangannya secara optimal. Sumber keuangan yang dapat digali pemerintah daerah berasal dari pajak dan retribusi daerah, laba perusahaan milik daerah dan pengelolaan asset daerah, dana perimbangan, pinjaman, dan lain sebagainya yang tercantum dalam APBD daerah.

Kewenangan daerah otonom juga mencakup kewenangan untuk menyelenggarakan keuangan daerah sendiri dalam upaya melaksanakan fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Pengelolaan keuangan secara baik dibutuhkan guna mendukung terlaksananya fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawabnya secara maksimal (Abdullah, 1982:250).

Pengelolaan keuangan daerah menyangkut pengelolaan pada dua aspek. *Pertama*, aspek penerimaan, yakni darimana dan dengan cara bagaimana pemerintah daerah mendapatkan sumber-sumber dananya. *Kedua*, aspek pengeluaran atau biasa disebut Belanja Daerah, yakni sejauhmana kebebasan daerah dalam menggunakan dananya dan bagaimana daerah menggunakan dana yang dimilikinya secara transparan (terbuka) dan akuntabel (bertanggung jawab) untuk menciptakan efisiensi dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Bappeda Kota Padang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Secara khusus tidak ada kebijakan tertulis dari Walikota Padang yang berbentuk Peraturan Walikota (Perwako) untuk menciptakan efisiensi anggaran belanja pegawai. Namun itu bukan berarti Pemerintah Kota Padang tidak peduli dengan penciptaan efisiensi. Walikota Padang tidak membuat secara tertulis kebijakan menciptakan efisiensi anggaran belanja pegawai tersebut dikarenakan Walikota telah memberitahukan dan menyarankan agar setiap Kepala SKPD Pemerintah Kota Padang membuat kebijakan internal sendiri terkait efisiensi anggaran belanja pegawai tersebut.
2. Bappeda Kota Padang adalah salah satu SKPD yang juga diberi kewenangan oleh Walikota untuk membuat kebijakan terkait dengan efisiensi belanja pegawai. Terbukti dari data yang peneliti dapatkan bahwa pada tahun anggaran 2006 Bappeda Kota Padang dapat menciptakan efisiensi anggaran belanja pegawai sebanyak 12,55 % dari total anggaran yang telah direalisasikan.

Adapun kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Padang untuk menciptakan efisiensi anggaran belanja pegawai langsung terhadap program/kegiatan pada tahun anggaran 2006 adalah sebagai berikut :

- a. Membuat dan Merancang Tim Agar Tidak Terlalu "Gemuk" dan "Lebar".
- b. Meningkatkan Mekanisme dan Tata Kerja yang Disertai Kinerja Aparatur.

- c. Menciptakan Efisiensi Anggaran Melalui Penghematan Dalam Menggunakan Sarana dan Prasarana Kerja.
 - d. Melakukan Monitoring dan Pengawasan Anggaran.
 - e. Kebijakan-kebijakan operasional lainnya.
3. Dalam pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran belanja pegawai tersebut tentu saja diiringi oleh keberadaan sejumlah kendala. Kendala-kendala tersebut juga menjadi tantangan bagi Bappeda Kota Padang untuk mengatasinya.

Adapun kendala yang ditemukan di Bappeda Kota Padang dalam melaksanakan kebijakan untuk menciptakan efisiensi anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2006 ini adalah :

- ◆ Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga penyelesaian pekerjaan terkadang belum berjalan maksimal yang mengacu kepada efisiensi dan efektivitas waktu pelaksanaan tugas.
4. Salah satu usaha untuk meminimalisir kendala yang terjadi adalah :
- ◆ Meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan serta memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik sesuai waktu dan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (1982). **Administrasi Keuangan Negara Suatu Pengantar**. Bhratara Karya Aksara. Jakarta
- Arsyad, Nurdjaman dkk. (1992). **Keuangan Negara**. Intermedia. Jakarta
- BPS Kota Padang. **Padang Dalam Angka 2006**. CV Aksara Adhikarya. Padang
- Chalid, Peni. (2005). **Keuangan Daerah "Investasi Dan Desentralisasi"**. PT Percetakan Penebar Swadaya. Jakarta
- Dunn, William N. (1999). **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Faisal, Sanapiah. (1990). **Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi**. YA3. Malang
- Hasibuan, Malayu Drs. (2005). **Manajemen Sumber Daya Manusia**. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Ikhsan, M dkk. (2002). **Keuangan Daerah Di Indonesia**. STIA LAN. Jakarta
- Kumorotomo, Wahyudi. (2005). **Anggaran Berbasis Kinerja "Konsep Dan Aplikasinya"**. Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Mardiasmo, Prof. (2002). **Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah**. Andi. Yogyakarta
- Moleong, Lexy. (2006). **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Remaja Rusdakarya. Bandung